

Analisis dampak utang luar negeri terhadap produk domestik bruto indonesia periode 1988 - 2019

Zainal Arifin H. Masri

Universitas Indraprasta PGRI

ARTICLE INFO

Article History:

Received Oct 13th, 2020

Revised March 22th, 2021

Accepted Sept 28th, 2021

Keywords:

Foreign debt;
Economic growth;
Qualitative methods;
Quantitative methods.

ABSTRACT

This study aims to see the impact of foreign debt on Indonesia's gross domestic product (GDP). This study uses a combined method, qualitative research methods and quantitative research methods. Qualitative methods are used to describe descriptively the development of foreign debt and GDP in Indonesia. The method used to explain statistically / quantitatively the relationship and influence of foreign debt on GDP in Indonesia. The data analysis technique used in quantitative methods is a simple regression equation, correlation coefficient, coefficient of determination and hypothesis testing (t test). The sample used is time series data for the last 30 years from the variables of external debt and GDP. The results of data processing using SPSS show that foreign debt has a significant effect on gross domestic product. External debt has a very strong relationship with gross domestic product. The calculation results obtained by the linear regression equation $Y = - 4,358,467,905 + 50,498,518X$, $r = 0.976$, $KD = 0.953$ and $Fcount = 568.018$ with $Sig F Change = 0.000$.

Studi ini bertujuan untuk melihat dampak utang luar negeri terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Studi ini menggunakan metode gabungan, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara deskriptif perkembangan utang luar negeri dan PDB di Indonesia. Metode yang digunakan untuk menjelaskan secara statistik/kuantitatif hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap PDB di Indonesia. Teknik analisis data yang digunakan dalam metode kuantitatif adalah persamaan regresi sederhana, koefisien korelasi, koefisien penentuan dan pengujian hipotesis (t test). Sampel yang digunakan adalah data time series selama 30 tahun terakhir dari variabel ULN dan PDB. Hasil pengolahan data menggunakan SPSS menunjukkan bahwa utang luar negeri memiliki efek signifikan terhadap produk domestik bruto. ULN memiliki hubungan yang sangat kuat dengan produk domestik bruto. Hasil perhitungan yang diperoleh dengan persamaan regresi linier $Y = - 4.358.467.905 + 50.498.518X$, tidak ada $r = 0,976$, $KD = 0,953$ dan $Fcount = 568,018$ dengan $Sig F Change = 0,000$.



© 2021 The Author(s). Published by Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta, Indonesia. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Corresponding Author:

Zainal Arifin H. Masri,
Email: zarifin243@yahoo.com

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang membangun. Sebagai Negara berkembang Indonesia melakukan pembangunan diberbagai sektor/aspek kehidupan. Pembangunan

nasional adalah serangkaian usaha pembangunan yang berkelanjutan meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Tujuan pembangunan nasional termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pembangunan nasional mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni aspek ideology, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Didalam program pembangunan nasional disebutkan tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan nasional harus sepenuhnya didukung oleh masyarakat Indonesia yang mandiri, sehat, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hokum dan lingkungan, disiplin dan mempunyai etos kerja yang tinggi, serta menguasai ilmu pengetahuan, dan teknologi. Hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Pembangunan nasional yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar. Sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri, juga dapat berasal dari luar negeri. Sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri dapat berupa penerimaan pajak, penerimaan migas dan penerimaan lainnya. Sedangkan sumber pembiayaan pembangunan yang berasal dari luar negeri berupa utang luar negeri. Penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri lainnya tidak mencukupi kebutuhan dana pembangunan, oleh karena itu untuk mencukupi kebutuhan dana pembangunan pemerintah melakukan pinjaman luar negeri berupa utang.

Utang luar negeri atau pinjaman luar negeri merupakan sebagian dari utang suatu Negara secara keseluruhan. Utang luar negeri diperoleh dari para kreditor luar negeri. Pemberi pinjaman/kreditor bias dari bank swasta asing, pemerintah Negara lain, dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan sebagainya. Sedangkan penerima pinjaman adalah pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak swasta. Jangka waktu pengembalian atau jatuh tempo ada yang bersifat jangka pendek ada juga yang bersifat jangka panjang.

Pembangunan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu Negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu Negara. Pembangunan ekonomi memiliki tiga komponen, yaitu :

1. Pembangunan sebagai suatu proses. Pembangunan sebagai suatu proses mengandung pengertian bahwa pembangunan dilakukan secara bertahap untuk menuju kondisi masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
2. Pembangunan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita. Pembangunan merupakan tindakan aktif yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan semua elemen Negara untuk berperan serta dalam pembangunan. Kenaikan pendapatan per kapita mencerminkan perbaikan dalam kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan pendapatan perkapita harus berlangsung dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, kenaikan pendapatan perkapita menunjukkan bahwa perekonomian dalam keadaan berkembang.

Pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi. Prmbangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, sebaliknya pertumbuhan ekonomi memperlancar proses pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian dalam suatu Negara. Suatu Negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila Produk Dometik Bruto Negara yang bersangkutan mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih bersifat kuantitatif ditunjukkan dengan adanya kenaikan pendapatan dan tingkat output produksi, sedangkan pembangunan ekonomi bukan hanya kuantitatif tetapi lebih bersifat kualitatif, bukan hanya kenaikan

pendapatan tingkat output produksi tetapi juga perubahan dalam struktur perekonomian dan alokasi input pada berbagai sector perekonomian.

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka dapat diinventarisir dan diidentifikasi beberapa masalah dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Masalah-masalah tersebut adalah:

1. Mengapa harus melakukan utang luar negeri?
2. Mengapa utang luar negeri begitu besar?
3. Apakah utang luar negeri yang begitu besar aman bagi keuangan negara?
4. Apakah utang luar negeri tidak menjadi beban bagi generasi mendatang?
5. Apakah bisa pembangunan nasional Indonesia dilakukan tanpa utang?
6. Mengapa PDB Indonesia relative kecil?

Berdasarkan identifikasi masalah diatas penelitian ini dibatasi hanya pada bagaimana dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan produk domestik bruto Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak utang luar negeri terhadap pertumbuhan ekonomi/produk domestik bruto dan untuk mengetahui apa saja utang luar negeri itu digunakan

Utang Luar Negeri

Pemerintah Indonesia dari masa ke masa telah menerpakan kebijakan utang luar negeri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain. KBBI juga mendefinisikan pinjaman sebagai utang yang dipinjam dari pihak lain dengan kewajiban membayar kembali. Menurut SKB Menteri Keuangan No. 185/KMK.03/1995 dan Kepala Bappenas No. KEP.031/KET/5/1995 utang luar negeri adalah penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.

Indonesia sebagai Negara berkembang mempunyai sejarah panjang dalam hal utang atau pinjaman kepada pihak luar, baik secara bilateral maupun multilateral lewat lembaga keuangan internasional dan regional. Menurut Lincolin Arsyad (2010) utang luar negeri merupakan sumber pembiayaan anggaran pemerintah dan pembangunan ekonomi. Utang luar negeri digunakan untuk membiayai belanja Negara sehingga dapat mendukung kegiatan ekonomi, terutama kegiatan-kegiatan produktif sehingga pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Utang biasanya dipakai untuk membiayai deficit anggaran. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja penurunan angka kemiskinan.

Utang luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu Negara yang diperoleh dari para kreditor di luar Negara tersebut. Para kreditor dapat berupa pemerintah Negara lain, bank swasta atau lembaga keuangan internasional seperti IMF, bank dunia, dan lainnya. Sedangkan penerima utang luar negeri bisa pemerintah, bank sentral, BUMN, perusahaan swasta dan perorangan (Ulfa, 2017). Menurut Astanti (2015) utang luar negeri dapat dilihat dari beberapa aspek:

- a. Aspek materi. Berdasarkan aspek materi, utang luar negeri merupakan arus masuk modal dari luar ke dalam negeri yang dapat menambah modal yang ada di dalam negeri
- b. Aspek formal. Aspek formal mengartikan utang luar negeri sebagai penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi.
- c. Aspek fungsi. Utang luar negeri merupakan salah satu alternative sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan.

Indonesia sebagai salah satu Negara berkembang telah, sedang dan akan melakukan pembangunan disegala aspek kehidupan. Pembangunan nasional yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia membutuhkan biaya yang sangat besar. Pembiayaan pembangunan yang sangat besar inilah yang merupakan salah satu kendala untuk melakukan pembangunan nasional. Untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional maka sumber pembiayaan adalah salah satunya bersumber dari utang. Penggunaan utang untuk pembiayaan pembangunan karena penerimaan pajak

Negara tidak mencukupi dan tabungan dalam negeri jumlahnya sangat terbatas. Ramadhani (2014) mengatakan sumber pembiayaan pembangunan berupa utang, khususnya utang luar negeri menjadi salah satu alternative pembiayaan pembangunan terutama bagi Negara-negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Utang menurut Triboto dalam Ayu (2016) dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu :

1. Berdasarkan bentuk utang yang diterima dibagi atas :
 - a. Bantuan proyek, yaitu bantuan luar negeri yang digunakan untk keperluan proyek pembangunan dengan cara memasukkan barang modal, barang dan jasa lainnya
 - b. Bantuan teknik, yaitu pemberian bantuan tenaga-tenaga teramoil atau ahli.
 - c. Bantuan program, yaitu bantuan yang dimaksud untuk dsns bsgis tujusn-tujusn ysng bersifat umum sehingga penerimanya bebas memilih penggunaanya sesuai kebutuhannya.
2. Berdasarkan sumber dana yang diterima dibagi atas :
 - a. Utang dari lembaga internasional, yaitu utang yang berasal dari badan-badan internasional, seperti bank dunia, world bank, IMF, ADB dan lainnya. Pada umumnya berupa utang dengan bunga yang ringan.
 - b. Utang dari Negara donatur, yaitu utang yang berasal dari Negara-negara donator, seperti kelompok Negara donator IGGI/CGI/IGI. Utang berupa pinjaman lunak.
3. Berdasarkan jangka waktu pengembalian, utang terbagi atas :
 - a. Utang jangka pendek, yaitu utang dengan masa jatuh tempo 1 – 5 tahun.
 - b. Utang jangka menengah, yaitu utang dengan masa jatuh tempo 5 – 15 tahun.
 - c. Utang jangka panjang, yaitu utang dengan masa jatuh tempo lebih dari 15 tahun
4. Berdasarkan status penerima utang dibagi atas :
 - a. Utang pemerintah, yaitu utang yang dilakukan oleh pihak pemerintah termasuk di dalamnya Bank Indonesia, BUMN
 - b. Utang swasta, yaitu utang dilakukan oleh pihak swasta.baik perusahaan maupun perorangan.
5. Berdasarkan syarat pinjaman, terbagi atas :
 - a. Pinjaman lunak, yaitu utang yang berasal dari lembaga bilateral maupun lembaga multilateral. Sumber dana lembaga multilateral adalah iuran anggotanya, sedangkan lembaga bilateral sumber dananya berasal dari anggran Negara tetangga. Yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan.
 - b. Pinjaman setengah lunak, yaitu utangy ang memiliki persyaratan pinjaman yang sebagian lunak dan sebagian komersial. Utang komersial sumber dananya berasal dari bank atau lembaga keuangan dengan persyaratan yang berlaku di pasar internasional pada umumnya.

Utang luar negeri memiliki dampak positif dan dampak negative. Dampak positive adalah mempelancar pembangunan ekonomi.dan peningkatan tabungan masyakat. Pembangunan ekonomi menciptakan lapangan kerja baru, masyarakat bisa bekerja dan memperoleh pendapatan, bisa meningkatkan tabungan masyakat. Utang luar negeri mempunyai *multiplier effect* positif terhadap perekonomian. Menurut Wahyuningsih (2012) utang luar negeri dapat meningkatkan investasi yang membuka lapangan kerja bagi masyarakat, yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan dan tabungan masyarakat.

Utang luar negeri juga memiliki dampak negative seperti yang dialami oleh Indonesia pada saat krisis ekonomi tahun 1997 – 1998. Dampak negative akan terjadi apabila nilai tukar mata uang Negara yang memiliki utang luar negeri mengalami penurunan yang tajam terhadap US Dolar dan mata uang dunia lainnya. Pada saat krisis ekonomi nilai tukar rupiah mengalami pelemahan yang sangat tajam terhadap US Dolar dan mata uang internasional lainnya, sehingga membuat utang luar negeri meningkat drastis. Untuk membayar utang luar negeri yang sudah jatuh tempo, pemerintah mengambil kebijakan “gali lobang tutup lobang” dengan mengajukan utang luar negeri yang baru., yang

mengakibatkan utang luar negeri semakin besar. Utang luar negeri yang meningkat dari tahun ke tahun juga mengakibatkan pembayaran cicilan pokok dan bunga semakin meningkat, sehingga berpengaruh terhadap kinerja APBN yang semakin menurun (Widharma, 2013).

Dalam prakteknya utang luar negeri tidak semuanya digunakan untuk belanja pembangunan. Sebagian utang luar negeri malah digunakan untuk membayar cicilan utang pokok dan bunganya. Hernatasa (2004) menemukan adanya *Fisher Paradox*, suatu kondisi dimana semakin banyak cicilan utang pokok dan bunganya dibayarkan semakin besar akumulasi utang luar negerinya. Swasono dan Arief (1999) juga menemukan bahwa cicilan utang pokok dan bunganya secara substansial dibiayai oleh utang baru sehingga terjadi net transfer sumber-sumber keuangan dari Indonesia kepada pihak-pihak kreditur asing.

Produk Domestik Bruto

Prasetyo (2011 : 28) mengatakan bahwa PDB adalah seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh warga masyarakat pada suatu wilayah Negara dalam satu tahun. Sedangkan menurut Sukirno (2010 : 34) PDB adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam 1 tahun. PDB menghitung hasil produksi suatu perekonomian tanpa memperhatikan siapa pemilik faktor produksi tersebut. Herlambang (2001 : 22) mengatakan PDB adalah total pendapatan yang dihasilkan suatu Negara, termasuk pendapatan orang asing yang bekerja dalam suatu Negara. PDB mengukur nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah Negara (domestik) tanpa membedakan kewarganegaraan pada waktu periode tertentu.

PDB merupakan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan suatu Negara dalam satu tahun. PDB mengukur nilai total barang dan jasa suatu Negara tanpa membedakan kewarganegaraan (Mankiw : 2007 : 17). Menurut McEachern (2000 : 146) PDB adalah jumlah nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu Negara dalam jangka waktu satu tahun. PDB juga dapat digunakan untuk mempelajari perekonomian dari waktu ke waktu. McEachern juga mengatakan ada dua jenis PDB, yaitu :

1. PDB Riil atau PDB harga tetap, yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam satu tahun dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. PDB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.
2. PDB Nominal/PDB harga berlaku, yaitu total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam satu tahun dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada saat dilakukan perhitungan PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi.

Perhitungan PDB dapat dilakukan dengan berbagai cara. Menurut Fair dan Case (2008: 35) perhitungan PDB ada tiga cara, yaitu:

1. Pendekatan Pendapatan. Perhitungan PDB dilakukan dengan cara menghitung pendapatan yang diterima oleh setiap faktor produksi, seperti upah, sewa, bunga dan laba.
2. Pendekatan Pengeluaran, Perhitungan PDB dengan cara menghitung jumlah pengeluaran atas semua barang dan jasa selama 1 tahun. Rumusnya adalah: $PDB = C + G + I + (X-M)$
3. Pendekatan Produksi. Perhitungan PDB dengan cara menghitung nilai produksi yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi pada suatu Negara baik itu milik warga Negara Indonesia maupun milik warga Negara asing.

Formulasi Model

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor dan impor terhadap produk domestik bruto. Sedangkan formulasi modelnya adalah: $Y = C + b_1X_1$, dimana :

Y = Produk Domestik Bruto (PDB);

X_1 = Utang luar negeri

Hipotesis Penelitian

H_0 : tidak ada pengaruh yang signifikan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto

H_a : ada pengaruh yang signifikan utang luar negeri terhadap produk domestik bruto

METODE

Penelitian ini menggunakan metode gabungan metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menjelaskan secara deskriptif naratif perkembangan utang luar negeri dan PDB di Indonesia. Metode kuantitatif digunakan untuk menjelaskan secara statistik/angka hubungan dan pengaruh utang luar negeri terhadap PDB di Indonesia.

Populasi dalam penelitian ini adalah data time series dari utang luar negeri dan produk domestik bruto mulai dari Indonesia merdeka sampai dengan tahun 2019. Sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi, yaitu data time series dari utang luar negeri dan produk domestik bruto selama 30 tahun terakhir.

Variabel operasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada table di bawah ini.

Tabel 1 Variabel Konseptual dan Variabel Operasional

No	Nama Variabel	Definisi Konseptual	Definisi Operasional
1	Utang luar negeri	penerimaan Negara baik dalam bentuk devisa, dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau jasa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.	Total utang luar negeri baik yang diterima oleh pemerintah, bank Indonesia maupun swasta
2	Produk domestik bruto	Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah total keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara pada periode tertentu (umumnya satu tahun).	total nilai harga barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu Negara dalam satu tahun dan dinilai berdasarkan harga yang berlaku pada saat dilakukan perhitungan

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kuantitatif. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan perangkat SPSS
2. Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis ini digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.
3. Analisis Korelasi. Analisis ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel independen yang satu dengan variabel independen lainnya, variabel independen dengan variabel dependen.
4. Analisis Koefisien Determinasi. Analisis ini digunakan untuk melihat berapa besar kontribusi pengaruh satu variabel independen terhadap variabel independen lainnya, kontribusi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen
5. Uji F. Uji F digunakan untuk menguji hipotesis penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Utang Luar Negeri

Perkembangan utang luar negeri, produk domestik bruto selama 30 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2. Di bawah. Peningkatan utang luar negeri menunjukkan bahwa belanja pembangunan yang semakin besar, sementara penerimaan Negara tidak mencukupi untuk menutupi biaya belanja pembangunan. PDB yang semakin meningkat disebabkan factor-faktor penentu PDB juga semakin besar.

Tabel 2. Utang Luar Negeri, PDB dan Pertumbuhan Ekonomi 1988 - 2019

Tahun	Utang Luar Negeri (Milyar USD)	PDB (Milyar Rupiah)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
1988	54.054	142104.800	5.7
1989	59.380	167184.700	7.5
1990	69.848	195597.200	7.4
1993	89.147	329775.800	6.5
1994	107.809	382219.700	7.5
1995	124.389	454514.100	8.1
1996	128.990	532568.000	7.8
1997	136.322	627695.400	4.7
1998	151.467	955753.500	-13.1
1999	151.788	1099731.600	0.8
2000	116.400	1264918.700	4.9
2001	126.300	1467654.800	3.4
2002	124.900	1619062.400	3.7
2003	124.000	1794663.400	4.1
2004	127.500	2032824.900	5.1
2005	134.504	2774281.100	5.6
2006	132.633	3339216.800	5.5
2007	141.180	3950893.200	6.3
2008	155.080	4948688.400	6.1
2009	172.871	5603871.200	4.6
2010	202.413	6446851.900	6.1
2011	225.375	7419187.100	6.2
2012	252.364	8230925.900	6.0
2013	266.109	9087276.500	5.6
2014	293.328	10094928.900	5.0
2015	310.730	11526332.800	4.9
2016	320.006	12401728.500	5.0
2017	352.469	13587212.600	5.1
2018	377.316	14837357.500	5.2
2019	395.309	15833943.400	5.3

Sumber : Bank Dunia, BI, BPS

Tabel 3. di bawah ini menunjukkan besarnya utang luar negeri beserta para penerimanya 10 tahun terakhir.

Tabel 3. Utang Luar Negeri Menurut Kelompok Peminjam (Juta USD)

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pemerintah & Bank Indonesia	99.265	118.624	118.643	126.119	123.548
1.1. Pemerintah	90.853	106.860	112.427	116.187	114.294
1.2. Bank Indonesia	8.412	11.764	6.216	9.932	9.254
2. Swasta	73.606	83.789	106.732	126.245	142.561
2.1. Lembaga Keuangan	12.597	17.957	24.570	30.730	32.378
2.1.1 Bank	9.531	14.382	18.467	23.018	24.431
2.1.2 LKBB	3.066	3.575	6.103	7.712	7.947
2.2. Bukan Lembaga Keuangan	61.009	65.832	84.162	95.515	110.183
Total (1 + 2)	172.871	202.413	225.375	252.364	266.109

Lanjutan tabel 3

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Pemerintah & Bank Indonesia	129.736	142.608	158.283	180.622	186.275
1.1. Pemerintah	123.806	137.396	154.875	177.318	183.197
1.2. Bank Indonesia	5.930	5.212	3.408	3.304	3.078
2. Swasta	163.592	168.122	161.723	171.847	191.041
2.1. Lembaga Keuangan	41.822	42.997	40.062	40.563	45.252
2.1.1 Bank	31.673	31.920	30.247	30.300	34.715
2.1.2 LKBB	10.149	11.077	9.815	10.263	10.537
2.2. Bukan Lembaga Keuangan	121.770	125.125	121.661	131.284	145.789
Total (1 + 2)	293.328	310.730	320.006	352.469	377.316

Sumber: BPS

Pada masa pemerintahan presiden SBY periode kedua 20 Oktober 2009 – 19 Oktober 2014 (2010 – 2014) utang luar negeri meningkat sebesar 90.915 juta USD yakni dari 202.413 juta USD menjadi 293.328 juta USD. Sementara itu Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo periode pertama 20 Oktober 2014 – 19 Oktober 2019 (2015 – 2019) utang luar negeri meningkat sebesar 84.579 juta USD yakni dari 310.730 juta USD menjadi 395.309 juta USD pada bulan Juli 2019. Angka-angka ini menunjukkan bahwa peningkatan utang luar negeri lebih besar terjadi pada era pemerintahan SBY dibandingkan pada masa pemerintahan Jokowi.

Pada awal pemerintahannya presiden Jokowi menyatakan bahwa dibutuhkan dana sebesar Rp 5.000 triliun untuk membangun infrastruktur di Indonesia (detik.com). Pada awal pemerintahan Jokowi utang luar negeri Indonesia pada tahun 2014 sudah mencapai 293.328 juta USD dengan kurs dollar pada saat itu (31 Desember 2014) sebesar Rp 12.502 per 1 USD maka utang luar negeri Indonesia jika dirupiahkan menjadi sebesar Rp 3.667,2 triliun. Sementara itu utang luar negeri per akhir Agustus 2019 sebesar Rp 5.553,5 triliun. Terjadi peningkatan utang luar negeri sebesar Rp 1.886,3 triliun, jauh dari angka yang direncanakan sebesar Rp 5.000 triliun.

Utang luar negeri Indonesia yang sangat besar adalah wajar mengingat Indonesia sedang melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional membutuhkan dana yang sangat besar yang tidak dapat ditanggung seluruhnya oleh penerimaan Negara berupa pajak, hibah dan penerimaan dalam negeri lainnya. Oleh karena itu untuk menutupi kekurangan dana pembangunan pemerintah melakukan pinjaman luar negeri. Bahkan adakalanya utang luar negeri juga digunakan untuk membayar cicilan bunga dan pokok utang tersebut, sehingga menyebabkan utang semakin membesar. Indonesia saat ini mengalami situasi yang disebut sebagai *Fisher Paradox* dalam hubungannya dengan utang luar negeri. *Fisher Paradox* adalah suatu kondisi dimana semakin besar cicilan utang luar negeri dilakukan semakin besar akumulasi utang luar negerinya. Ini disebabkan cicilan pokok utang plus bunga utang luar negeri lebih besar dari nilai utang baru, maka terjadilah *net transfer* sumber-sumber keuangan dari Indonesia ke pihak-pihak kreditor asing.

Undang-Undang No. 17/2013 tentang keuangan Negara membolehkan utang luar negeri maksimal 60% dari PDB karena masih dianggap aman. Sementara itu utang luar negeri Indonesia per

September 2019 berada pada kisaran 29,2% PDB. Utang luar negeri juga dianggap aman apabila cicilan utang plus bunga tidak mengganggu “likuiditas” keuangan Negara. Selain itu utang luar negeri masih dianggap aman jika penggunaannya untuk proyek-proyek yang bersifat produktif, yaitu proyek-proyek yang dapat menciptakan lapangan kerja baru dan menciptakan “demand” bagi produk-produk hasil dalam negeri.

Utang luar negeri Indonesia yang digunakan untuk proyek-proyek produktif akan dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Masyarakat bisa bekerja dan memperoleh penghasilan. Dengan penghasilannya, masyarakat bisa membayar pajak dan menabung. Pajak yang dibayar masyarakat kepada Negara dapat digunakan untuk membayar utang luar negeri, sedangkan tabungan dapat digunakan untuk investasi dan akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian utang luar negeri Indonesia tidak akan menjadi beban tanggungan generasi mendatang.

Tindakan hati-hati dari pemerintah amat sangat diperlukan dalam pengelolaan utang luar negeri Indonesia, agar tidak terjadi krisis ekonomi seperti tahun 1998. Masalah utama utang luar negeri adalah utang luar negeri tidak hanya utang pemerintah termasuk BI di dalamnya, tetapi juga terdapat utang swasta. Utang luar negeri pihak swasta dapat berpotensi menimbulkan krisis ekonomi, karena tidak bisa dikontrol pemerintah. Pengelolaan dan pembayaran utang pokok dan bunganya, hanya bergantung pada perusahaan peminjam itu sendiri. "Khususnya bagi perusahaan swasta dalam negeri yang tidak melakukan *hedging* atau lindung nilai (sejenis penjaminan).

Utang luar negeri bisa ditekan dengan mencari sumber pendanaan lainnya. Salah satu alternative adalah investasi swasta dalam negeri. Pemerintah hanya focus pada proyek-proyek infrastruktur yang sifatnya langsung untuk kepentingan publik, selebihnya proyek-proyek yang sifatnya komersial serahkan kepada swasta untuk mengerjakannya. Misalnya jalan tol tidak perlu menggunakan APBN, tetapi ditawarkan kepada swasta. Masalahnya adalah investasi swasta dalam negeri saat ini pertumbuhannya baru sebesar 10%.

Utang luar negeri bisa menjadi solusi pembiayaan pembangunan tetapi jua dapat menjadi masalah baru dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Utang luar negeri akan menjadi solusi pembiayaan pembangunan jika dikelola dengan baik. Sebaliknya akan menjadi masalah baru jika tidak dikelola dengan baik.

Utang luar negeri digunakan untk membiayai pembangunan pada semua sector pembangunan. Sektor mana yang menyerap utang luar negeri terbesar baik pada masa pemerintahan SBY maupun pemerintahan Jokowi terlihat pada table 4.

Tabel 4 Utang Luar Negeri Menurut Sektor Ekonomi (Jutaan USD)

	2009	2010	2011	2012	2013
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	6.103	6.860	7.069	7.533	8.862
Pertambangan & Penggalian	12.879	11.679	17.703	21.074	27.544
Industri Pengolahan	21.358	21.479	24.533	27.180	30.135
Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara	14.632	17.716	21.144	23.555	20.430
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	388	352	304	244	215
Konstruksi	11.327	11.667	11.724	10.779	9.632
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto	5.091	6.262	7.684	8.926	7.754
Transportasi dan Pergudangan	3.424	4.055	5.142	5.911	5.338
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	203	260	331	397	348
Informasi dan Komunikasi	4.949	5.888	7.019	7.967	6.953
Jasa Keuangan dan Asuransi	32.278	40.604	89.609	47.523	54.348
Real Estate	2.783	3.564	4.539	5.432	4.770
Jasa Perusahaan	925	1.177	1.493	1.783	1.567
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan	28.619	41.594	47.650	55.814	60.046

Jaminan Sosial Wajib					
Jasa Pendidikan	3.922	4.153	4.285	4.250	4.428
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.946	10.010	10.542	10.286	9.262
Jasa Lainnya	15.044	15.094	14.602	13.709	14.477
Total	172.871	202.413	225.375	252.364	266.109

		Lanjutan Tabel 4				
		2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan		9.279	17.171	16.829	17.044	16.376
Pertambangan & Penggalian		27.234	25.912	23.759	23.584	34.756
Industri Pengolahan		33.346	34.422	34.818	36.456	34.820
Pengadaan Listrik, Gas, Uap / Air Panas dan Udara		23.240	23.068	23.691	28.545	38.362
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi		190	2.967	2.620	3.420	4.412
Konstruksi		9.184	20.895	23.842	31.604	33.692
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Moto		9.197	9.609	8.742	9.621	9.711
Transportasi dan Pergudangan		6.162	14.005	13.495	15.781	19.587
Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum		421	408	416	530	552
Informasi dan Komunikasi		7.988	8.100	8.677	9.045	4.829
Jasa Keuangan dan Asuransi		58.585	67.882	66.889	68.346	78.558
Real Estate		5.768	6.285	5.343	6.084	6.488
Jasa Perusahaan		1.890	1.870	1.950	2.403	3.470
Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib		74.947	19.717	24.129	24.491	25.561
Jasa Pendidikan		4.151	20.748	23.301	27.866	28.714
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial		8.400	24.147	29.166	35.022	34.419
Jasa Lainnya		13.346	13.525	12.337	12.617	12.187
Total		293.328	310.730	320.006	352.469	377.376

Sumber: BPS

Berdasarkan data di atas, sejak era pemerintahan Jokowi periode pertama ada 3 sektor ekonomi yang mengalami peningkatan drastis. Ketiga sektor ekonomi tersebut adalah konstruksi, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Jika diakhir periode SBY (2014) sektor konstruksi sebesar 9.184 juta USD menjadi 20.895 juta USD diawal pemerintahan Jokowi. Sementara itu sektor pendidikan sebesar 4.151 juta USD menjadi 20.748 juta USD, dan sector kesehatan dan kegiatan social dari 8.400 juta USD menjadi 24.147 juta USD.

Tabel 5. Posisi Utang Luar Negeri Menurut Jangka Waktu Asal dan Kelompok Peminjam

		2009	2010	2011	2012	2013
1. Utang Jangka Pendek / ≤ 1 tahun	1. Pemerintah dan Bank Sentral	4.709	9.630	4.276	7.415	6.708
	1.1 Pemerintah	-	1.496	1.585	890	748
	1.2 Bank Sentral	4.709	8.134	2.691	6.525	5.961
	2. Swasta	19.341	23.417	33.897	36.839	36.031
	Total	24.049	33.047	38.173	44.253	42.739
2. Utang Jangka Panjang / > 1 tahun	1. Pemerintah dan Bank Sentral	94.556	108.994	114.366	118.704	116.840
	1.1 Pemerintah	90.853	105.364	110.842	115.297	113.546

	1.2 Bank Sentral	3.703	3.630	3.524	3.407	3.294
	2. Swasta	54.265	60.372	72.835	89.407	106.530
	Total	148.821	169.366	187.201	208.111	223.370
TOTAL (1 + 2)	1. Pemerintah dan Bank Sentral	99.265	118.624	118.642	126.119	123.548
	1.1 Pemerintah	90.853	106.860	112.427	116.187	114.294
	1.2 Bank Sentral	8.412	11.764	6.215	9.932	9.255
	2. Swasta	73.606	83.789	106.732	126.245	142.561
	TOTAL	172.871	202.413	225.375	252.364	266.109

Lanjutan tabel 5

		2014	2015	2016	2017	2018
1. Utang Jangka Pendek / ≤ 1 tahun	1. Pemerintah dan Bank Sentral	3.661	2.957	845	2.416	1.045
	1.1 Pemerintah	822	682	258	1.926	722
	1.2 Bank Sentral	2.838	2.276	587	490	324
	2. Swasta	41.390	35.758	39.746	44.233	46.710
	Total	45.050	38.716	40.590	46.650	47.755
2. Utang Jangka Panjang / > 1 tahun	1. Pemerintah dan Bank Sentral	126.075	139.650	157.439	178.206	185.230
	1.1 Pemerintah	122.983	136.714	154.617	175.392	182.475
	1.2 Bank Sentral	3.092	2.937	2.821	2.814	2.754
	2. Swasta	122.203	132.364	121.977	127.613	144.331
	Total	248.278	272.015	279.415	305.819	329.561
TOTAL (1 + 2)	1. Pemerintah dan Bank Sentral	129.736	142.608	158.283	180.622	186.275
	1.1 Pemerintah	123.806	137.396	154.875	177.318	183.197
	1.2 Bank Sentral	5.930	5.212	3.408	3.304	3.078
	2. Swasta	163.592	168.123	161.722	171.847	191.041
	TOTAL	293.328	310.730	320.006	352.469	377.316

Sumber : BPS

Berdasarkan tabel 5 di atas, utang luar negeri Indonesia dalam jangka pendek (jatuh tempo ≤ 1 tahun) berada dalam kisaran 12% - 13% dari total hutang. Sisanya merupakan utang jangka panjang. Dari utang luar negeri jangka pendek yang jatuh tempo dan segera dibayar utang pemerintah dan BI hanya 2% - 2,5%, sisanya adalah utang swasta. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pemerintah utang luar negeri masih dalam kondisi aman, namun demikian pemerintah harus dapat mengendalikan utang luar negeri pihak swasta. Apabila pihak swasta tidak mampu membayar utang luar negerinya yang akan jatuh tempo maka akan mengakibatkan krisis ekonomi sebagaimana terjadi pada tahun 1997 – 1998.

Tabel 6. Indikator Utang Luar Negeri (%)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*
Rasio Utang terhadap Ekspor	121,77	114,92	100,97	113,82	123,12	139,46	168,39	176,14	168,04	163,89
Rasio Utang terhadap PDB	31,76	26,55	25,03	27,41	29,13	32,95	36,09	34,30	34,71	36,21

Sumber: BPS

Rasio utang luar negeri Indonesia terhadap PDB telah mencapai angka 32,21%. Angka ini masih dianggap aman karena jauh dari angka yang dibolehkan oleh UU No. 17/2013 tentang Keuangan Negara. Undang-undang memperbolehkan utang luar negeri maksimal mencapai 60%. Namun demikian pemerintah tetap harus menjaga likuiditas keuangan Negara.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan kenaikan output total (PDB) dalam jangka panjang tanpa dikaitkan dengan laju pertumbuhan penduduk dan struktur perekonomian. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu negara dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Bruto (PDB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. PDB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, sedang harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Tabel 7 PDB Harga Konstan (Milyar Rp) dan Pertumbuhan Ekonomi (%)

Tahun	PDB Harga Konstan (Milyar Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	5.606.203,40	4,55
2010	6.864.133,10	6,14
2011	7.287.635,30	6,17
2012	7.727.083,40	6,03
2013	8.156.497,80	5,56
2014	8.564.866,60	5,01
2015	8.982.517,10	4,88
2016	9.434.613,40	5,03
2017	9.912.703,60	5,07
2018	10.425.316,30	5,17

Sumber: Kemendag, 2018

Berdasarkan data pada tabel 7 di atas selama 10 tahun terakhir terjadi peningkatan PDB dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Pertumbuhan ekonomi berada dalam kisaran 5%. Pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan stagnan karena laju pertumbuhan ekonomi sangat kecil. Pemerintahan Jokowi pada periode pertama belum berhasil memenuhi target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. Kegagalan mencapai target pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh factor global dan factor domestic. Faktor global adalah pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat, perang dagang antara Cina dan USA. Sedangkan factor domestic adalah harga komoditas yang pada periode 2010 – 2014 melesat

tinggi tidak terjadi lagi pada periode awal pemerintahan Jokowi, kebijakan tax amnesti membuat para pengusaha menahan diri untuk melakukan konsumsinya . Namun demikian pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di atas pertumbuhan ekonomi Negara lain, hanya di bawah India dan China.

Hasil perhitungan dengan SPSS dipeoleh :

1. Persamaan regresi linear $Y = - 4.358.467,905 + 50.498,518 X$. Persamaan ini menunjukkan bahwa
 - a. Apabila utang luar negeri sebesar 0 milyar USD, maka PDB sebesar – 4.358.467,905 milyar rupiah
 - b. Kenaikan utang luar negeri sebesar 1 milyar USD akan menyebabkan kenaikan PDB sebesar 50.498,518 milyar rupiah, demikian sebaliknya
2. Koefisien korelasi = 0,976, angka ini menunjukkan bahwa hubungan utang luar negeri dengan PDB adalah hubungan yang positif (searah) dan sangat kuat
3. $KD = 0,953$, angka ini berarti bahwa utang luar negeri memberikan kontribusi sebesar 95,3% terhadap PDB Indonesia, sisanya sebesar 4,7% dipengaruhi oleh variable ekonomi lainnya yang tidak dimasukkan kedalam model
4. $F_{hitung} = 568,018$ dengan Sig F Change = 0,000, mengandung pengertian bahwa dengan selang kepercayaan (α) 10%, 5% atau 1%, utang luar negeri mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB Indonesia

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Utang luar negeri diperlukan karena pendapatan Negara tidak mencukupi untuk membiayai belanja Negara. Dengan utang luar negeri pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia disegala bidang bisa berjalan dengan baik.
2. Utang luar negeri dapat dilakukan selama tidak mengganggu “likuiditas” keuangan Negara dan masih berada dibawah rasio 60% dari PDB.
3. Utang luar negeri harus digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang produktif yang menciptakan lapangan kerja baru. Dengan terciptanya lapangan kerja baru, masyarakat bisa bekerja dan memiliki penghasilan. Adanya penghasilan membuat masyarakat mampu membayar pajak dan menabung. Pajak masyarakat untuk membayar bunga dan cicilan utang luar negeri, sedangkan tabungan masyarakat bisa diubah menjadi investasi masyarakat untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang produktif lainnya. Sehingga pada akhirnya utang luar negeri tidak menjadi beban bagi generasi mendatang.
4. Utang luar negeri juga harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan krisis ekonomi. Sebagian besar utang luar negeri merupakan utang swasta dimana pembayaran cicilan dan bunga tergantung pada laba yang diperoleh perusahaan. Pemerintah kesulitan mengontrol utang luar negeri pihak swasta tersebut.
5. Pemerintah harus berusaha mencari alternative sumber dana pembiayaan lainnya. Salah satu sumber dana tersebut adalah investasi, namun demikian pada saat ini investasi masih sangat kecil.
6. Pemerintah menggiatkan kembali gerakan menabung di masyarakat, agar terkumpul modal pembangunan yang cukup besar untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
7. Pemerintah lebih mengefektifkan penarikan pajak, bukan dengan jalan memperbanyak jumlah wajib pajak tetapi meningkatkan nilai nominal pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi kelima. Yogyakarta. UPP STIM YKPN
- Astanti, Ayu. 2015. *Analisis Kausalitas Antara Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1990 – 2013*. Jember. Skripsi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
- Case, Carl E dan Fair Ray C. 2008. *Prinsip-Prinsip Ekonomi*. Jakarta. Erlangga
- Herlambang, Tedy, dkk. 2001. *Ekonomi Makro : Teori, Analisis dan Kebijakan*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Hernatasa. 2004. *Analisis Utang Luar Negeri Indonesia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Bogor. Tesis Sekolah Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor
- Mankiw, N Gregory. 2007. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta. Penerbit Salemba Empat
- McEachern, William. 2000. *Ekonomi Makro : Pendekatan Kontemporer*. Jakarta. Salemba Empat
- Prasetyo, Eko. 2011. *Fundamental Makro Ekonomi : sebuah Pengetahuan Tingkat Dasar dan Menengah Serta Advanced Untuk Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta. Beta Offset
- Ramadhani, Muhammad Adib. 2014. *Pengaruh Defisit Anggaran, Pengeluaran Pemerintah dan Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Enam Negara Asean Tahun 2003 – 2012)*. E-journal Ilmu Ekonomi Universitas Brawijaya.
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Swasono, Sri Edi dan Arief Sritua. 1999. *Pembangunan Tanpa Utang : Utang Luar Negeri dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Harian Republika
- Tribroto. 2001. *Kebijakan dan Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh*. Jakarta. Jurnal Bank Indonesia.
- Ulfa, Salawati dan T. Zulham. 2017. *Analisis Utang Luar Negeri dan Pertumbuhan Ekonomi : Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM) Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syahkuala. Volume 2 Nomor 1 hal : 144 – 152.
- Wahyuningsih, Anik. 2013. *Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. <http://anikwahyuningsih.blogspot.co.id>. 26 Februari 2013. Diakses tanggal 19 Oktober 2019
- Widharma, I Wayan Gayun, dkk. 2013. *Utang Luar Negeri Pemerintah Indonesia : Kajian Terhadap Faktor-Faktor yang Berpengaruh*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana. Volume 2 Nomor 2, hal : 1 – 20.
- UUD NKRI 1945 Pembukaan
- UU No. 17/2013 tentang Keuangan Negara
- SKB Menteri Keuangan No. 185/KMK.03/1995 dan Kepala Bappenas No. Kep. 031/KET/5/1995 tentang Utang Luar Negeri